

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami masa-masa pasang surut. Dimulai pada tahun 1983, ketika berbagai macam deregulasi dilakukan oleh pemerintah, kemudian industri perbankan berkembang pesat dalam kurun waktu 1988-1996. Pada pertengahan tahun 1997, industri perbankan terpuruk sebagai imbas dari terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pada tahun 1997, Indonesia diterpa krisis ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat suku bunga yang mencapai 70% mengakibatkan runtuhnya dunia usaha dan dunia industri yang kemudian berimbas pula pada bank selaku kreditur utamanya. Perbankan diliputi kredit macet akibat dana/kredit yang disalurkan tidak dapat ditarik sepenuhnya. Kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya pada pihak bank merosot. Para nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran dari bank. Akibat terjadinya penarikan dana secara bersamaan (*rush*), bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini menyebabkan negara harus mengambil kebijakan untuk melikuidasi 16 bank yang bermasalah.

Baru-baru ini, dunia perbankan Indonesia juga dikejutkan oleh kasus penutupan atau likuidasi Bank IFI yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasar Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17

April 2009, Dewan Gubernur BI mencabut izin usaha PT Bank IFI. Likuidasi Bank IFI dilakukan karena pihak manajemen bank tidak bisa menambah modal dan menjaga likuiditasnya. Dari data laporan keuangan Bank IFI per Februari 2009, total kredit yang diberikan Bank IFI adalah sebesar Rp 264 miliar, Dari jumlah itu, yang masuk dalam kelompok lancar hanya Rp 163 miliar. Artinya, hampir 40 persen kreditnya bermasalah. Tingginya angka kredit bermasalah ini menyebabkan Bank IFI mengalami kerugian karena terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan bunga dengan biaya bunga. Dari laporan laba rugi Bank IFI, pendapatan bank hanya Rp 1,7 miliar sementara biaya bunga mencapai Rp 10 miliar. Itu berarti pendapatan bunga bersih minus Rp 8,3 miliar. Tingginya angka NPL tersebut menyebabkan Bank IFI tidak mampu memperoleh pendapatan atau laba dari kegiatan operasionalnya. Padahal menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:99), pendapatan bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank yang bersangkutan. Buruknya rentabilitas Bank IFI diikuti oleh kesulitan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga Bank Indonesia mengambil keputusan untuk menutup kegiatan usaha Bank IFI.

Dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa rentabilitas merupakan salah satu hal yang penting bagi bank. Bank harus senantiasa menjaga rentabilitasnya untuk menjaga kontinuitas usahanya. Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase (Malayu S.P Hasibuan, 2007:100). Rasio rentabilitas bank adalah alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas memberikan informasi mengenai seberapa efisien suatu bank

dalam kegiatan usahanya karena rasio ini mengindikasikan berapa besar keuntungan dapat diperoleh rata-rata pada setiap rupiah assetnya. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:100), pendapatan bank merupakan hal yang amat penting bagi bank karena pendapatan bank dapat menjamin kontinuitas bank yang bersangkutan, dapat membayar dividen pemegang saham bank, merupakan tolak ukur tingkat kesehatan bank, merupakan tolak ukur baik atau buruknya manajemen bank, dapat meningkatkan daya saing bank yang bersangkutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk memperoleh pendapatan dan menghasilkan laba tersebut, bank melakukan berbagai jenis usaha. Kegiatan utama bank dalam upaya memperoleh laba adalah dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dalam pemberian kredit, disamping dikenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada debitur dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Hal itulah yang sampai saat ini menjadi sumber utama pendapatan bank. Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang diberikan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan nama *spread based*.

Kinerja rentabilitas bank diukur melalui rasio rentabilitas. Bank Indonesia menilai kondisi rentabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator, yaitu *Return on Asset (ROA)* dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). *Return on Asset (ROA)* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara

keseluruhan. ROA mengukur keseluruhan efektifitas bank dalam menghasilkan profit dengan asset yang tersedia atau dengan kata lain mengukur kemampuan bank dengan asset yang dimilikinya. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang diakui keberadaannya disamping bank sentral dan bank umum. Namun berbeda dengan bank umum, kegiatan usaha BPR dibatasi oleh pemerintah untuk tidak ikut serta dalam lalu lintas jasa perbankan dan penjualan surat-surat berharga. Sesuai dengan namanya, yang menjadi tumpuan dalam upaya perolehan laba sekaligus menjadi kegiatan utama BPR adalah penyaluran kredit pada masyarakat. BPR dalam memberikan jumlah penyaluran dana kredit yang begitu besar bahkan kredit merupakan bagian asset terbesar yang dimiliki BPR. Dengan demikian, kredit ini menjadi aktiva produktif yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan laba bagi bank. Namun disisi lain, kredit yang menjadi tumpuan kegiatan usaha bagi BPR juga memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi yaitu resiko kegagalan nasabah/debitur dalam membayar kembali pinjamannya pada saat kredit tersebut jatuh tempo (NPL).

Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga memiliki banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Daya tarik Bandung sebagai kota wisata dan mode, mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan berbagai jenis usaha baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung didirikan diantaranya adalah untuk membantu permodalan

masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Berikut ini merupakan tabel kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung:

Tabel 1.1  
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung

No	Indikator	2008				2009	
		Maret	Juni	September	Desember	Maret	Juni
1	CAR	16.83%	12.85%	11.66%	12.40%	14.29%	13.12%
2	LDR	57.86%	61.43%	60.94%	69.96%	61.60%	57.48%
3	BOPO	118.36%	114.72	112.05%	111.41%	112.08%	111.70%
4	ROA	-1.81%	-1.41%	-0.92%	-0.89%	-0.89%	-1.05%
5	ROE	-17.24%	-13.96%	-9.97%	30.38%	29.63%	34.06%
6	NPL	10.97%	10.57%	9.30%	9.81%	11.28%	12.70%

Sumber: Bank Indonesia, diolah.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kinerja BPR di Kota Bandung pada tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2009 menunjukkan kondisi yang kurang baik terutama jika dilihat dari segi ROA dan NPL atau dengan kata lain BPR yang ada di Kota Bandung mengalami masalah dalam segi pengembalian kredit yang telah diberikannya dan juga kinerja rentabilitas yang rendah. Dari tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2009 *Return on Asset* (ROA) BPR di Kota Bandung terhitung rendah bahkan menunjukkan angka negatif. Angka negatif ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Bandung mengalami kerugian. Pada triwulan I 2008 ROA menunjukkan angka -1,81% yang merupakan angka terendah selama tahun 2008. Memasuki triwulan II dan III 2008, angka ROA bergerak naik menjadi -1,41% dan -0,92%. Meskipun lebih baik dari periode sebelumnya namun angkanya masih negatif yang menunjukkan bahwa BPR masih mengalami kerugian. Tahun 2008 ditutup dengan angka ROA sebesar 0,89%. Untuk tahun

2009 pun keadaannya tidak jauh berbeda, ROA BPR di Kota Bandung menunjukkan angka negatif yang mengindikasikan bahwa BPR mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan efektifitas BPR di Kota Bandung dalam menghasilkan profit dengan asset yang dimilikinya masih rendah.

Sementara itu, di sisi lain jumlah kredit bermasalah atau *non performing loan* pada BPR di Kota Bandung menunjukkan angka yang cukup besar sebagaimana terlihat dalam tabel I.2. Pada triwulan pertama 2008 angka NPL adalah sebesar 10,97%. Memasuki triwulan II dan III 2008 jumlahnya berkurang menjadi 10,57% dan 9,30%. Namun pada akhir tahun 2008 jumlah NPL kembali mengalami kenaikan menjadi 9,81%. Memasuki triwulan I dan II 2009 jumlahnya pun terus meningkat menjadi sebesar 11,28% dan 12,70%. Jumlah tersebut tentunya cukup mengkhawatirkan karena menurut ketentuan Bank Indonesia, tingkat NPL yang wajar adalah sebesar 5% dari jumlah kredit yang diberikan. Meningkatnya jumlah *non performing loan* ini diikuti oleh menurunnya rentabilitas bank. Hal ini terjadi karena kredit yang telah diberikan kepada debitur merupakan bagian terbesar asset yang dimiliki oleh bank dan merupakan sumber pendapatan utama bank, maka timbulnya NPL akan menyebabkan penerimaan pendapatan bank dari kredit yang telah diberikannya menjadi terhambat, dan rentabilitas bank pun akan menurun.

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, kredit merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh laba yang didapat dari bunga atas pokok pinjaman. Laba yang berhasil diperoleh digunakan untuk mendanai usaha peningkatan jasa bank dan juga untuk mendanai perluasan usaha. Selain itu,

aktifitas kredit juga dapat meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dan barang, serta dapat meningkatkan keairahan usaha. Namun, disamping manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi, kredit juga memiliki resiko yang cukup besar dalam setiap penyalurannya. Resiko kredit menurut Dahlan Siamat (2001:92) adalah suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah/debitur dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Besarnya resiko kredit ditunjukkan dalam *Non Performing Loan* (NPL) dalam laporan keuangan bank. Tingginya menunjukkan banyaknya pihak debitur yang tidak dapat membayar secara kontinuitas pinjaman kreditnya. Dalam PSAK No.31, kredit *non perform* adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya lewat 90 hari atau jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Jika kenaikan nilai kredit bermasalah (NPL) ini terus berlanjut, maka *non performing loan* akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas. Selain itu, bank juga akan mengalami peningkatan aktiva produktif, penurunan ROA dan penurunan CAR yang menggambarkan menurunnya tingkat kesehatan bank, dan pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya reputasi bank. Dalam skala yang lebih besar, menurunnya tingkat reputasi bank akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah pada bank sehingga nasabah akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar

dalam jumlah yang bersamaan (*rush*), yang akan mengancam kelangsungan usaha bank.

Dari fenomena tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh hubungan antara tingkat *Non Performing Loan* dengan tingkat rentabilitas suatu bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dalam kegiatan usahanya memang sangat mengandalkan kredit. Oleh karena itu, penulis menulis suatu usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Kota Bandung Tahun 2008”

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimanakah pengaruh *non performing loan* (NPL) terhadap rentabilitas pada suatu bank”. Permasalahan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah gambaran tingkat *non performing loan* (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung
- 2) Bagaimanakah gambaran tingkat rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung
- 3) Bagaimanakah pengaruh *non performing loan* (NPL) terhadap rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung

### **I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaruh resiko kredit yang ditunjukkan oleh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung. Penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dilihat dari segi rentabilitas khususnya dari segi ROA-nya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui tingkat *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung dilihat dari segi ROA (*Return On Asset*).
- 3) Untuk mengetahui pengaruh resiko kredit terhadap rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung.

### **I.4 Kegunaan Penelitian**

#### **I.4.1 Kegunaan Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkuat atau mengoreksi teori/paradigma rentabilitas yang ada, maupun penelitian penelitian terdahulu yang membahas masalah yang sama.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pendorong untuk dilakukannya penelitian yang lebih komprehensif mengenai pengaruh antara tingkat *Non Performing Loan* terhadap rentabilitas suatu bank.

#### I.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Bandung dalam mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah kredit bermasalah atau *non performing loan*.

